



KATA PENGANTAR

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu, sebagai mana diamatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Buru. Selain itu, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun 2024, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel serta pencapaian Good Governance dan Clean Government.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Buru tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasan.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Kabupaten Buru Tahun 2024 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 Kabupaten Buru dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam tahun berikutnya.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Namlea, Maret 2025

PJ BUPATI BURU, 
SYARIF HIDAYAT, S.E., M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk kepedulian Pimpinan Pemerintah Kabupaten Buru dan seluruh aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru untuk menyesuaikan diri dengan era perubahan guna mendorong terwujudnya Good Governance di Indonesia juga sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Buru yang dilakukan secara periodik. Adapun metode yang digunakan untuk pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi capaian kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil untuk mendapatkan penyebab tidak tercapainya target sasaran atau terjadinya perbedaan antara kinerja dan realisasinya, sehingga diketahui tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Melalui metode pengukuran ini dapat pula bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi Pemerintah Kabupaten Buru.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Buru telah memperlihatkan pencapaian kinerja ditahun 2024 belum bisa maksimal dengan kata lain mengalami penurunan persentase capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama Bupati tahun 2024, disimpulkan bahwa sebanyak 10 (sepuluh) indikator dibawah 100 persen, 3 (tiga) indikator 100 persen dan 5 (lima) indikator diatas 100 persen.

Indikator Kinerja Utama yang masuk kriteria sangat tinggi yaitu indikator yang pencapaiannya ≥ 100 persen meliputi : Rasio KDRT, Persentase penduduk berakses air minum, PDRB perkapita (juta/penduduk), Tingkat inflasi, Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDB (miliar/rupee), dan Tingkat pengangguran.

Indikator Kinerja Utama yang kriteria 100 persen meliputi : Indeks pembangunan, Opini BPK dan Nilai hasil evaluasi AKIP.

Indikator Kinerja Utama yang kriteria ≤ 100 persen meliputi : Jumlah taman quran yang

aktif, Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 100 kelahiran hidup, Persentase rumah tinggal bersanitasi, Tingkat kemiskinan, Indeks pelayanan publik, Persentase ketaatan terhadap RTRW, dan Proporsi jalan dalam kondisi baik.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Geografi dan Demografi	2
1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	2
1.2.2 Jumlah Penduduk	3
1.2.3 Indeks Pembangunan Manusia	4
1.2.4 Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur	5
1.3 Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	5
1.4 Isu Strategi dan Arah Kebijakan	7
Bab II Perencanaan Kinerja	9
2.1 Rencana strategi	9
2.1.1 Visi dan Misi	9
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.1.3 Strategi Kebijakan dan Program	12
2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	16
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Utama Tahun 2023	19
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
1. Indeks Pembangunan Manusia	20
2. Jumlah Taman Pengajian Yang Aktif	20
3. Rasio KDRT	22
4. Angka Kematian Ibu melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	23
5. Angka Kematian Bayi Per 100 Kelahiran Hidup	24
6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum	25
7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	27
8. PDRB Perkapita (juta/penduduk)	27



9. Tingkat Inflasi	28
10. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (miliar/rupiah)	29
11. Tingkat Kemiskinan	30
12. Tingkat Pengangguran	31
13. Persentase PMKS Yang Tertangani	32
14. Indeks Pelayanan Publik	34
15. Opini BPK	35
16. Nilai Hasil Evaluasi AKIP	37
17. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	38
18. Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik	38
3.3 Akuntabilitas Anggaran	40
Bab IV Penutup	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

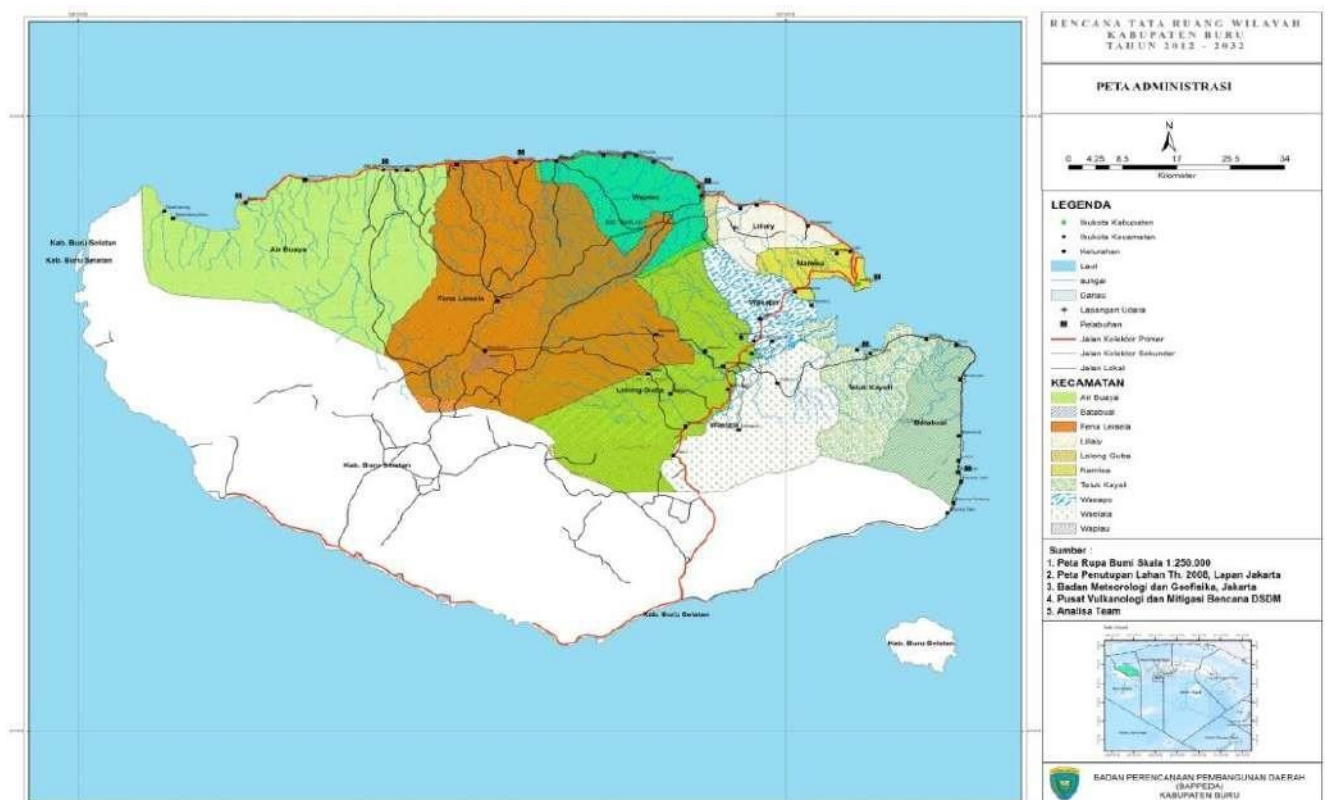
Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan kedepan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Buru disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Buru.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan dan Laut Banda;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Buru Selatan dan Laut Seram;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Manipa.



Secara administratif sesuai Keputusan Bupati Buru Nomor 146 – 202 Tahun 2010, Kabupaten Buru terdiri dari 10 Kecamatan, 82 Desa dan 103 Dusun. Selain itu dalam rangka mengurangi rentang kendali baik secara administrasi maupun pelayanan publik maka pemerintah Kabupaten Buru membentuk kembali desa persiapan untuk dimekarkan sejumlah 38 Desa persiapan. Berdasarkan data proporsi wilayah terluas di Kabupaten Buru adalah Kecamatan Fena Leisela dengan luas 2.831,65 atau sebesar 37,28 Persen dari total wilayah kabupaten, sedangkan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Waeapo hanya 1,35 persen dari luas wilayah Kabupaten Buru atau seluas 7.595,58 Km². Secara lengkap data luas wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Buru tersaji pada tabel berikut :

Tabel: 1.1 Luas Wilayah Kabupaten Buru dirinci Menurut Kecamatan,Desa/Dusun Tahun 2024

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah		Jumlah	
			(Km ²)	(%)	Desa	Dusun
1	Namlea	Namlea	951,15	12,52	7	9
2	Waplau	Waplau	585,23	7,70	10	3
3	Airbuaya	Airbuaya	1.702,35	22,41	10	9
4	Waeapo	Waenetat	102,50	1,35	7	8
5	Batabual	Ilath	108,60	1,43	5	4
6	Lolong Guba	Kubalahin	457,02	6,02	10	24
7	Waelata	Basalale	234,50	3,09	10	21
8	Fena Leisela	Wamlana	2.831,65	37,28	13	22
9	Teluk Kayeli	Kayeli	141,08	1,86	5	3
10	Lilialy	Sawa	481,50	6,34	5	-
T o t a l			7.595,58	100,00	82	103

1.2.2. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Buru berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berjumlah 141.361 jiwa yang terdiri dari 71.598 jiwa laki-laki dan 69.763 jiwa perempuan, kepadatan penduduk di Kabupaten Buru mencapai 24/km². Kepadatan penduduk tertinggi terjadi

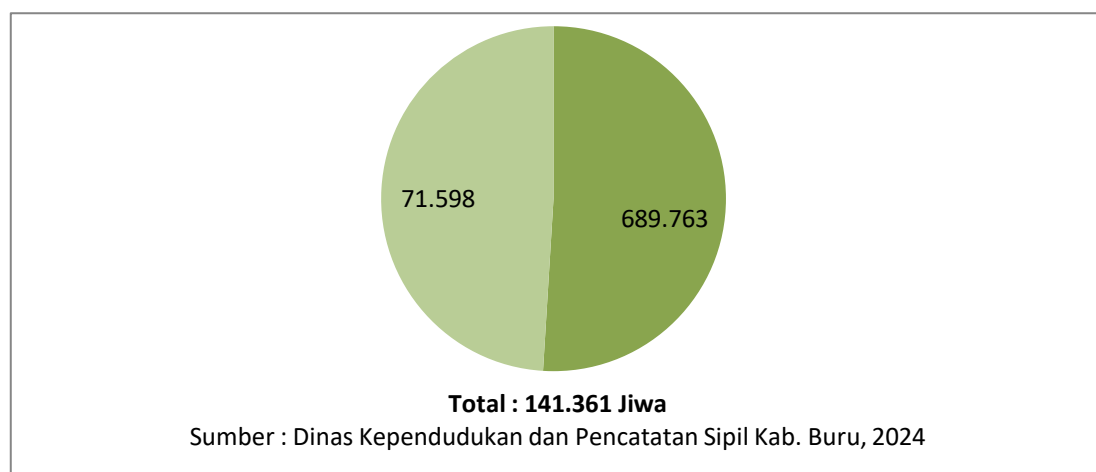
di Kecamatan Namlea yakni 124 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Teluk Kaiely yakni 4 jiwa/km²

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Namlea	18.644	18.620	37.665
2	Air Buaya	6.128	5.954	12.252
3	Waeapo	6.487	6.205	12.851
4	Waplau	6.639	6.547	13.400
5	Batabual	4.648	4.613	9.344
6	Lolongguba	6.827	6.488	13.649
7	Waelata	7.509	6.937	14.679
8	Fena Leisela	5.883	5.650	11,734
9	Teluk Kaiely	2.245	2.167	4.444
10	Lilialy	5.588	5.593	11.346
Total		71.598	69.763	141.361

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

Grafik 1.1 jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Buru Tahun 2024



1.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Buru tahun 2024 sebesar 72,55 dan menempati peringkat ke-empat setelah Maluku Tengah, Maluku Tenggara

dan Maluku Tenggara Barat. Secara umum, IPM Kabupaten Buru tahun 2024 meningkat dari tahun 2019.

1.2.4. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Salah satu instrument penunjang utama pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru sebanyak 3.625 orang, sekitar 54 persen diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 45 persen berjenis kelamin perempuan yang terdiri dari :

Tabel. 1.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2024

Tingkat pendidikan	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD/Sederajat	6	-	6
SMP/Sederajat	13	3	16
SMA/Sederajat	462	326	788
Diploma I	2	19	21
Diploma II	70	108	178
Diploma III	75	285	360
Diploma IV	26	16	42
S1	859	1286	2145
S2	41	28	69
Jumlah	1554	2071	3625

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya manusia Kabupaten Buru

Tabel. 1.3 Jumlah Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjia Kerja
Government Employees with Work Agrrement
Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2024

Tingkat pendidikan	2024		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SD/Sederajat	-	-	-
SMP/Sederajat	-	-	-
SMA/Sederajat	19	6	25
Diploma I	-	-	-
Diploma II	-	-	-
Diploma III	62	292	354
Diploma IV	-	14	14
S1	159	396	555
S2	-	-	-
Jumlah	240	708	948

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya manusia Kabupaten Buru

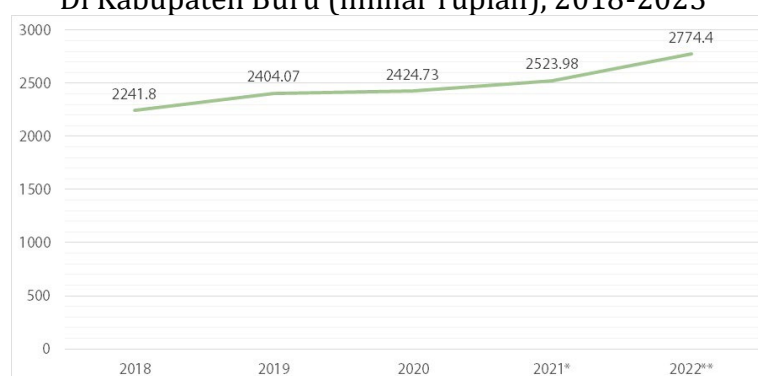
1.3. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah yang didefinisi sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut.

PDRB Kabupaten Buru atas dasar harga berlaku mencapai 2.774,40 miliar rupiah pada tahun 2024. Dari sisi lapangan usaha, kontribusi terbesar diberikan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yakni sebesar 906,11 miliar rupiah atau sekitar 32,66 persen sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas tercatat sebagai sektor dengan kontribusi terkecil yakni sebesar 2,35 miliar rupiah atau sekitar 0,08 persen dari total PDRB. Dari sisi pengeluaran, kontribusi terbesar diberikan oleh kelompok pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yakni sebesar 2.333,47 miliar rupiah atau sekitar 84,11 persen sedangkan kelompok Perubahan Inventori merupakan jenis pengeluaran dengan kontribusi terkecil sebesar 20,98 miliar rupiah atau sekitar 0,76 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buru tahun 2024 tercatat mengalami kenaikan, yakni dari angka 3,02 persen pada tahun 2021 menjadi 5,56 persen pada tahun 2022 (data 2023 belum dirilis BPS).

Grafik 1.2 PDRB Atas dasar Harga Berlaku Menurut lapangan Usaha Di Kabupaten Buru (miliar rupiah), 2018-2023



Sumber : BPS (Angka Sementara)

Tabel 1.3 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buru, 2018-2023



Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.14	33.96	33.78	34.35	32.73
2	Pertambangan dan Penggalian	0.83	0.80	0.78	0.78	0.78
3	Industri Pengolahan	14.86	15.18	15.17	14.56	14.33
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.37	0.37	0.37	0.38	0.38
6	Konstruksi	7.48	7.48	7.63	7.71	8.22
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.79	6.81	6.90	6.75	7.11
8	Transportasi dan Pergudangan	3.01	3.12	3.11	2.77	2.82
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.33	1.29	1.29	1.21	1.21
10	Informasi dan Komunikasi	1.16	1.15	1.14	1.17	1.20
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.80	1.84	1.81	1.95	2.07
12	Real Estat	0.40	0.38	0.36	0.36	0.35
13	Jasa Perusahaan	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	17.98	17.96	17.95	18.11	18.77
15	Jasa Pendidikan	4.39	4.28	4.26	4.29	4.27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.65	3.62	3.65	3.86	4.00
17	Jasa Lainnya	1.62	1.58	1.59	1.57	1.56
Produk Domestik Regional Bruto		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS (data sementara) 2024

Tabel 1.3 PDRB Atas dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Buru (miliar rupiah), 2018-2024

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	761.27	812.17	832.78	825.98	906.11
2	Pertambangan dan Penggalian	17.86	18.68	18.85	19.79	21.02
3	Industri Pengolahan	340.24	364.80	353.00	361.75	420.16
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.84	1.85	2.02	2.18	2.35
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	8.26	8.87	9.12	9.65	10.06
6	Konstruksi	167.72	183.46	186.86	207.57	221.45
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	152.66	165.96	163.75	179.35	199.92
8	Transportasi dan Pergudangan	69.85	74.84	67.17	71.22	85.94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	28.94	31.08	29.25	30.64	32.57



10	Informasi dan Komunikasi	25.77	27.44	28.48	30.24	33.01
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	41.25	43.61	47.20	52.21	57.35
12	Real Estat	8.54	8.69	8.74	8.88	9.32
13	Jasa Perusahaan	2.45	2.59	2.61	2.75	3.00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	402.69	431.54	439.21	473.81	502.41
15	Jasa Pendidikan	95.95	102.42	104.14	107.82	114.45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	81.04	87.77	93.52	100.85	111.94
17	Jasa Lainnya	35.45	38.30	38.03	39.28	43.35
Produk Domestik Regional Bruto		2 241.80	2 404.07	2 424.73	2 523.98	2 774.40

Sumber : BPS (angka sementara) 2024

1.4. Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Buru dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Buru. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buru 2023-2026 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 3 (Tiga) tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Buru 2023-2026, sebagai berikut :

1. Optimalisasi pembangunan sektor primer menuju transformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
2. Penguatan sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang berkualitas berbasis dinamika kebutuhan spasial;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, efektif dan efisien;
4. Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan; dan
5. Penataan ruang, konektivitas wilayah dan mitigasi kawasan.

Sedangkan arah kebijakan Kabupaten Buru 2023-2026, sebagai berikut:



Arah kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Pemulihan sosial ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia	Pemulihan sosial ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia	Pemantapan ekonomi, penguatan SDM dan lingkungan hidup berkualitas untuk tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif dan terpeliharanya ketertiban masyarakat	Peningkatan kualitas ekonomi infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang efektif, menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban masyarakat	Pertumbuhan ekonomi berkualitas, penguatan infrastruktur, tata kelola pemerintahannya efisien dan efektif, pelestarian lingkungan hidup dan penurunan angka kemiskinan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Rumusan visi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buru Tahun 2023 – 2026, yakni **“Terwujudnya Buru Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan”** Secara filosofi visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Buru yang:

1. **Maju** dapat dimaknai, bahwa dalam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang religius dengan disiplin tinggi serta sehat dan cerdas sebagai fondasi dalam membentuk kehidupan yang berkualitas dan berbudaya.
2. **Mandiri** dapat dimaknai, bahwa dalam pengembangan potensi lokal wilayah untuk mengerakan ekonomi masyarakat melalui inovasi dan kreativitas menuju masyarakat yang mandiri.
3. **Sejahtera**, dapat dimaknai, bahwa dalam meningkatnya kualitas masyarakat, tersedianya lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya kesenjangan antar kelompok dan antar wilayah, tersedianya ifrastruktur serta terbinanya kekuatan-kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
4. **Berkeadilan** dapat dimaknai, bahwa pembangunan yang merata di seluruh wilayah dan meningkatkan budaya politik masyarakat yang demokratis dengan menjunjung tinggi rasa keadilan demi terwujudnya stabilitas kehdupan bermasyarakat. Terjaminnya penegakan hukum dan hak asasi anusia serta menciptakan tata pemerintahan yang bersih, jujur, berwibawa, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

Sebagai penjabaran dari visi RPD Kabupaten Buru Tahun 2023 – 2026, maka rumusan visi tersebut perlu dioperasikan kedalam beberapa misi. Adapun penjelasan lebih lanjut terkait 5 misi utama Kabupaten Buru sebagai berikut :

1. Mewujudkan jati diri dan karakter masyarakat bupolo yang berkualitas;
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat buru yang sejahtera dan makmur;
4. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan demokratis; dan
5. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dan dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, dari visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas kemudian dirumuskan IKU, Indikator Kinerja yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024 merupakan ukuran keberhasilan Kerja Pemerintah Kabupaten Buru dan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran stratesis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1 keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Visi : Terwujudnya Buru Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan					
Misi		Tujuan		Sasaran Strategis	
		Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1	Mewujudkan jati diri dan karakter masyarakat bupolo yang berkualitas	Meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan dasar yang berkualitas berbasis dinamika kebutuhan spasial	Indeks pembangunan manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pembangunan manusia
				Meningkatnya pemahaman dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari	Jumlah taman pengajian Quran yang aktif
				Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak menuju Kabupaten layak anak	Rasio KDRT
				Meningkatnya derajat kesehatan	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup
					Angka kematian bayi per 100 kelahiran hidup
				Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Persentase penduduk berakses air minum
					Persentase rumah tinggal bersanitasi
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berdaya saing	Mengoptimalkan pembangunan sektor primer menuju transformasi struktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PDRB perkapita (juta/penduduk0
					Tingkat inflasi
				Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomo daerah	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milliard rupiah)
3	Mewujudkan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan	Indeks desa membangun	Meningkatnya kualitas hidup	Tingkat Kemiskinan

	Buru yang sejahtera dan makmur	masyarakat berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan		masyarakat	Tingkat pengangguran
				Pemberdayaan penyandang masalah kesenjangan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani
4	Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, akuntabel, efisien dan efektif	Indeks kinerja pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik
				Meningkatnya manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK
					Level maturitas SPIP
					Nilai hasil evaluasi AKIP
5	Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan penataan ruang, memperkuat konektivitas wilayah dan mitigasi bencana	Indeks gini rasio	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase ketaatan terhadap RTRW
				Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah	Proporsi jalan dalam kondisi baik

2.1.3. Strategi Kebijakan dan Program

Strategi dan arah kebijakan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1 : Mewujudkan Buru Yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan			
Meningkatkan jati diri dan karakter masyarakat bupolo yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Meningkatkan mutu pendidikan dasar; 2. Melestarikan adat, budaya dan sejarah daerah; 3. Pembinaan kelembagaan kepemudaan.	1. Peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui penyediaan sarana prasarana, peningkatan kompetensi guru dan siswa; 2. Pemerataan guru pada wilayah



			terpengcil dan terkebelakang; 3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelestarian seni, budaya dan sejarah; 4. Penguatan kapasitas kelembagaan pemuda; 5. Peningkatan sarana prasarana olahraga.
	Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak menuju Kabupaten layak anak	Penguatan kelembagaan P2TP2A	Perlindungan hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
	Meningkatnya derajat kesehatan	1. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan pada layanan dasar dan layanan rujukan; 2. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan; 3. Meningkatkan promosi kesehatan bagi masyarakat; 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan balita.	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada tingkat dasar dan rujukan, melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan, peningkatan SDM kesehatan serta optimalisasi layanan jaminan kesehatan masyarakat; 2. Pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif; 3. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan balita
	Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Pengembangan sistem penyediaan	Penyediaan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum (SPAM) bagi masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Tangguh dan Berdaya Saing			
Mengoptimalkan pembangunan sektor primer menuju transformasi struktur untuk pertumbuhan	Meningkatkan kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	1. Pengendalian harga barang; 2. Peningkatan dan pengembangan produktivitas	1. Menjaga stabilitas harga dan stok barang; 2. Peningkatan produksi, mutu



ekonomi yang berkualitas		perindustrian dan perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah.	dan promosi produk UMKM dan koperasi.
	Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah	1. Meningkatkan promosi investasi dan penciptaan iklim berusaha	Peningkatan promosi investasi dan pengelolaan sistem investasi berkelanjutan
Misi 3 : Mewujudkan Masyarakat Buru Yang Sejahtera dan Makmur			
Meningkatkan pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal untuk pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran secara terpadu	Pemberdayaan masyarakat kurang mampu dan peningkatan keterampilan tenaga kerja
	Pemberdayaan penyandang masalah kesenjangan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan masyarakat	1. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS); 2. Meningkatkan sarana prasarana sosial	1. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PMKS); 2. Peningkatan sarana prasarana.
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Demokratis			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Membangun open government dalam penyelenggaraan pemerintahan; 2. Pengembangan SKPD yang inovatif, kreatif serta peningkatan transformasi digital	1. Perkuatan, keterbukaan informasi, transparansi serta mendorong partisipasi publik termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; 2. Mendorong pengembangan SKPD yang inovatif, kreatif serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan dan birokrasi
	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel	1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib; 2. Peningkatan sistem pengendalian internal pemerintah; 3. Meningkatkan sistem manajemen akuntabilitas berbasis kinerja instansi	1. Pengelolaan keuangan dan aset daerah secara tertib sesuai aturan berlaku; 2. Pengendalian SPIP melalui perencanaan, penganggaran



		pemerintah	serta pelaksanaan; 3. Membangun sistem akuntabilitas kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Misi 5 : Terwujudnya Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan			
Peningkatan penataan ruang, memperkuat konektivitas wilayah dan mitigasi bencana	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Penyediaan regulasi dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah	1. Penyediaan dokumen rencana umum tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang; 2. Peningkatan pengendalian tata ruang dan penyediaan aparat penyedik tata ruang
	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah	Meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan kota, kabupaten, kecamatan dan desa	Peningkatan prasarana dan sarana jalan dan jembatan yang menghubungkan kota, kabupaten, kecamatan dan desa untuk perpendek rentan kendali

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Uraian prioritas pembangunan daerah kemudian diturunkan dalam penentuan target kinerja untuk pencapaian sasaran dalam jangka menengah. Ini bisa dimaknai bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis, seperti pencapaian target jangka pendek (1 tahun)

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dari kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Semua yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan sasaran yang sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan menacu kepada RKPD 2024, IKU dan APBD. Pemerintah Kabupaten Buru telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks pembangunan manusia	69,62
2	Meningkatnya pemahaman dan implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari	Jumlah taman pengajian Quran yang aktif	286
3	Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak menuju Kabupaten layak anak	Rasio KDRT	0,024
4	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000	97
		Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	8
5	Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat	Persentase penduduk berakses air minum	78,52
		Persentase rumah tinggal bersanitasi	80,84
6	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan nilai tambah produk unggulan daerah	PDRB perkapita (juta/penduduk)	12.838,09
		Tingkat inflasi	2,5-3,23
7	Meningkatnya peran investasi terhadap ekonomi daerah	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milliar/rupee)	102.561.079.000
8	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Tingkat kemiskinan	16,17
		Tingkat pengangguran	2,5
9	Pemberdayaan penyandang masalah kesenjangan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	79,69
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	61,18
11	Meningkatnya manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Opini BPK	WTP
		Nilai hasil evaluasi AKIP	B
12	Meningkatnya ketaatan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	Persentase ketaatan terhadap RTRW	77,5
13	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas wilayah	Proporsi jalan dalam kondisi baik	27,93

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandalkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, akan menunjukan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Inteval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91=100	Sangat Tinggi
2	76=90	Tinggi
3	66=65	Sedang
4	51=65	Rendah
5	=50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017, diolah

3.1. Capaian Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Pemerintah Kabupaten Buru telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Buru Tahun 2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Buru Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian RKPD (2024) %
				Target	Realisasi	Capaian %		
1	Indeks pembangunan manusia	%	100,10	69,52	72,55	104	69,62	104
2	Jumlah taman Quran yang aktif	Jumlah	80	286	268	93,7	286	93,7
3	Rasio KDRT	%	0,03	0,02	0,03	150	0,026	115,3
4	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	%	7,24	97	30	30,93	97	30,93
5	Angka kematian bayi per 100 kelahiran hidup	%	84	8	7	87,5	8	87,5
6	Persentase penduduk berakses air minum	%	104	78,52	80,25	102,2	78,52	102,2
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	90,01	80,84	75,03	92,81	80,84	92,8
8	PDRB perkapita (juta/penduduk)	%	130	12.838,09				
9	Tingkat inflasi	%	120	2,5-3,27	4,85	148	2,5-3,27	148
10	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milliar rupiah)	Milliar/Rupiah	200	103.561.079.000	209.918.555.801	202,7	103.561.079.000	202,7
11	Tingkat kemiskinan	%	151,1	16,17	16,08	99,44	16,17	99,4
12	Tingkat pengangguran	%	120	2,5	4,66	186,4	2,5	186,4
13	Persentase PMKS yang tertangani	%	98,01	79,69	35,64	44,72	100	35,6
14	Indeks pelayanan publik	%	101,68	61,18	59,86	97,84	61,18	97,8
15	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100
16	Nilai hasil evaluasi AKIP	B	B	B	B	100	B	100
17	Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	129,8	77,5	76	98,70	77,5	98,7
18	Proporsi jalan dalam kondisi baik	%	178,7	27,93	41,76	149,5	89,66	46,6

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Indeks Pembangunan Manusia

Status pembangunan manusia yang diukur dari indeks pembangunan manusia (IPM) selama periode 2023-2024 secara umum telah menunjukkan perubahan dan perbaikan. Indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Buru sebagai berikut :

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Indeks Pembangunan Manusia

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Indeks pembangunan manusia (point)	87,84	69,52	72,55	104	69,52	104

Tabel 3.4 Perbandingan indeks pembangunan manusia dengan kabupaten di Provinsi Maluku

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maluku Tenggara Barat	65,75	65,85	66,33	67,04	70,58
Maluku Tenggara	68,57	68,69	69,23	69,91	81,63
Maluku Tengah	73,20	73,27	73,73	74,34	75,10
Buru	70,55	70,93	71,52	72,11	72,55
Kepulauan Aru	66,88	66,99	67,36	68,19	69,00
Seram Bagian Barat	69,68	69,9	70,76	71,68	72,54
Seram Bagian Timur	68,11	68,29	69,05	69,84	70,28
Maluku Barat Daya	64,66	65,14	65,84	66,71	67,68
Seram Bagian Timur	62,98	63,74	64,12	64,30	65,05
Maluku Barat Daya	60,64	61,55	61,90	62,37	63,07
Buru Selatan	66,14	66,25	66,81	67,68	68,54
Kota Ambon	81,69	82,07	82,44	82,44	83,37
Kota Tual	70,24	70,44	70,85	71,67	72,48
Maluku	71,34	71,55	72,04	72,75	73,40

BPS (data sementara)

Tabel.3.5 Perbandingan IPM Kab. Buru dengan Tahun Sebelumnya

Uraian	Indeks Pembangunan Manusia			
	2021	2022	2023	2024
IPM Kab.Buru	69,33	69,94	70,56	72,55
Target IPM Kab.Buru (poin)	69,33	69,43	69,52	69,52
Tingkat capaian	100%	100,10%	100,15%	104

Indeks pembangunan manusia (point) dengan target pada tahun 2024 sebesar 69,52, realisasi 72,55 dengan capaian kinerja mencapai 104 persen, dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2023 sebesar 100 persen maka dikategorikan berhasil. Indeks pembangunan manusia (point) memenuhi target RPD di tahun 2024 sebesar 69,52 dengan capaian pada RPD sebesar 104 persen.

2. Jumlah Taman Quran Yang Aktif

Taman pendidikan Al-Quran disingkat TPA atau TPQ merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non formal jenis keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Quran sejak usia dini, serta memahami dasar - dasar dinul islam pada anak usia taman kanak - kanak, sekolah dasar dan atau madrasah ibtidaiyah (SD/MI) atau bahkan yang lebih tinggi.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Jumlah taman quran yang aktif

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2023			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Jumlah taman quran yang aktif	92,0	286	262	93,7	286	93,7

Tabel 3.7 Perbandingan Jumlah taman quran yang aktif

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah taman quran yang	-	-	286	286

aktif				
-------	--	--	--	--

Sumber : Bagian Kesra

Jumlah taman quran yang aktif pada tahun 2024 dengan target 286 Realisai 262 dengan capaian 93,7 persen dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 92,0 persen maka dikategorikan berhasil. Jumlah taman quran yang aktif blm menunjukkan keberhasilan dimana target pada RPD di tahun 2024 sebesar 286 dengan capaian 93,7 persen.

Capaian kinerja jumlah taman quran yang aktif ditunjang oleh program :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3. Rasio KDRT

Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian di Kabupaten Buru adalah kekerasan pada perempuan dan anak. Berdasarkan laporan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2023 Kabupaten Buru menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan 16 jumlah kasus.

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Rasio KDRT

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Rasio KDRT	150	0,024	0,014	58	0,024	58

Tabel 3.9 Perbandingan
Rasio KDRT

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kekerasan dalam rumah tangga	10	11	16	10
Jumlah rumah tangga	39.515	39.814	41.017	69,798
Rasio KDRT	0,03	0,03	0,03	0,014

Sumber : Dinas PP dan PA, Kab. Buru

Rasio KDRT pada tahun 2024 dengan target 0,024 Realisasi 0,014 dengan capaian 58 persen dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 sebesar 150 persen maka dikategorikan belum berhasil memenuhi target tetapi indikator rasio KDRT pada Tahun 2024 mengalami penurunan angka kekerasan dalam rumah tangga. Rasio KDRT belum menunjukkan keberhasilan dimana target pada RPD di tahun 2023 sebesar 0,024 dengan capaian 58 persen.

Rasio KDRT menunjukkan persentase kasus KDRT dibandingkan dengan jumlah rumah tangga. Selama kurung waktu 3 Tahun (2021-2024) rasio KDRT mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Semakin kecil rasio KDRT menunjukkan indikasi yang semakin baik.

Capaian kinerja rasio KDRT ditunjang oleh program :

2. Program Pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan
3. Pemenuhan hak anak

4. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran hidup

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran hidup

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	7,24	97	30	30,9	97	30,9

Tabel 3.11 Perbandingan
Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah ibu melahirkan yang hidup	2.586	2.721	2.593
Jumlah ibu melahirkan yang meninggal	5	4	14
Persentase ibu melahirkan yang meninggal	193	0,14	0,26

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Buru, 2024

Capaian kinerja dengan indikator angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024 menargetkan 97 realisasi 30 dengan capaian kinerja 30,9 persen, dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 7,24 persen maka bisa dikategorikan bahwa angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada target RPD tahun 2024 belum mencapai target 97 dengan capaian RPD tahun 2023 sebesar 30,9 persen.

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2021 sampai 2023 mengalami pasang surut dimana pada tahun 2021 dengan jumlah kasus 5, tahun 2022 mengalami penurunan 4 kasus dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 14 kasus.

Capaian kinerja angka kematian ibu melahirkan ditunjang oleh program :

1. Program pemenuhan upaya kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

5. Angka Kematian Bayi Per 100 Kelahiran Hidup

Tabel 3.12 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Angka Kematian Bayi per 100 kelahiran hidup

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	84	8	7	87,5	8	87,5

Tabel 3.13 Perbandingan
Angka Kematian Bayi per 100 Kelahiran Hidup

Uraian	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah kelahiran bayi	2.586	2.595	2.550
Jumlah kelahiran bayi yang meninggal	20	65	63
Persentase kelahiran bayi yang meninggal	7,7	7,7	12,94

Dinas Kesehatan Kab. Buru, 2024

Angka bayi kematian per 100 kelahiran hidup pada tahun 2024 ditargetkan 8, realisasi 7 dengan capaian 87,5 persen, dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian 84 persen maka dikategorikan belum berhasil tetapi mengalami penurunan pada angka kematian bayi per tahun 2024. Capaian kinerja angka kematian belum memenuhi target pada RPD sebesar 8 dengan capaian 87,5 persen.

Capaian kinerja cakupan balita gizi buruk ditunjang oleh program :

1. Program pemenuhan upaya kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat

6. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Tabel 3.14 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Persentase Penduduk Berakses Air Minum

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Persentase penduduk berakses air minum	104	78,52	80,25	102	78,52	102

**Tabel 3.15 Perbandingan
Persentase Penduduk Berakses Air Minum**

Indikator Kinerja utama	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih (jiwa)	94.956	108.330	108.605	108.605
Jumlah penduduk (jiwa)	135.238	159.256	135.308	141.361
Persentase jumlah penduduk yang mendapat akses air bersih	70.21	68,02	78,52	78,52

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, 2024

Persentase penduduk berakses air minum dengan target pada tahun 2024 sebesar 78,52 realisasi 80,25 dengan capaian 102 persen, dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 104 persen. Persentase penduduk berakses air minum dikategorikan berhasil melampaui target RPD di tahun 2024 sebesar 78,52 dengan capaian sebesar 102 persen.

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Buru dari tahun 2021 sampai 2024 walaupun belum mencapai 100 persen. Namun jika dilihat dari persentase jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak mencapai 70,21 persen, menurun di tahun 2022 68,02 persen, tahun 2024 meningkat menjadi 78,52 persen, harapannya kedepan Pemerintah Kabupaten Buru dapat tercapai 100 persen air minum layak.

Capaian persentase penduduk berakses air minum ditunjang oleh program :

1. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

7. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Tabel 3.16 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	92,01	80,84	75,03	92,81	80,84	92,81

Tabel 3.17 Perbandingan
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Indikator Kinerja utama	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Sanitasi layak	62,32	65,44	74,33	75,03
Sanitasi Aman	0,80	2,19	2,19	2,19

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, 2024

Persentase rumah tinggal bersanitasi dengan target pada tahun 2024 sebesar 80,84 realisasi 75,03 dengan capaian 92,81 persen, dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar persen. Persentase penduduk berakses air minum belum dikategorikan berhasil, target RPD di tahun 2024 sebesar 80,84 dengan capaian sebesar 92,81 persen.

Capaian persentase penduduk berakses air minum ditunjang oleh program :

3. Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
4. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum

8. PDRB perkapita (juta/penduduk)

Perkembangan jumlah penduduk menjadi peran penting dalam meningkatkan PDRB disuatu wilayah, PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator PDRB perkapita pada tahun 2024 (data belum tersedia) sehingga yang disajikan adalah data ditahun 2023.

Tabel 3.18 Target dan Realisasi Capaian Sasaran PDRB perkapita (juta/penduduk)

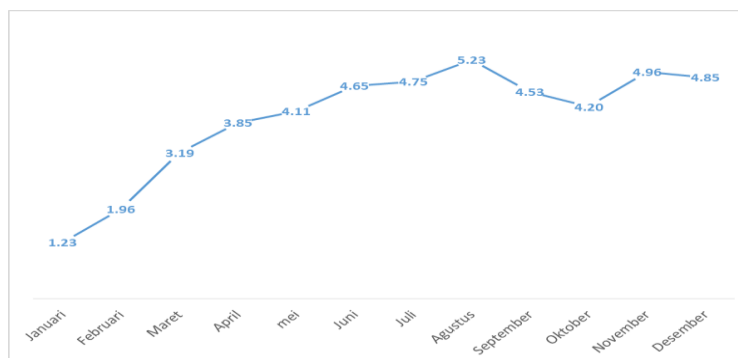
No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	PDRB perkapita (juta/Penduduk)	130	12.838,09	21.201	165	12.838,09	165

9. Tingkat Inflasi

Tabel 3.19 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Tingkat Inflasi

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Tingkat inflasi	120	2,5-3,27	4,85	148	2,5-3,27	148

Tabel. 3. 20 Tingkat inflasi Kabupaten Buru Tahun 2024



Sumber BPS (data sementara)

Capaian kinerja tingkat inflasi dari target di tahun 2024 sebesar 2,5-3,27, realisasi 4,85 dengan capaian kinerja 148 persen, hal ini berbanding dengan tahun 2023 di mana persentase capaian mencapai namun masih dikategorikan berhasil. Tingkat inflasi memenuhi target pada RPD di tahun 2024 dengan capaian 2,5-3,27 persen.

Kabupaten Buru tidak mengalami deflasi. Sepanjang tahun 2024 Kabupaten Buru mencatat terjadi inflasi sepanjang tahun. Hingga pada bulan

Desember 2024 inflasi Kabupaten Buru sebesar 4,85 persen. Dari gambar diatas pula, dapat disimpulkan bahwa inflasi Kabupaten Buru tahun 2024 adalah sebesar 4,85 persen.

Capaian kinerja tingkat inflasi ditunjang oleh program :

1. Program Perekonomian Pembangunan

10. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milliar/rupiah)

Tabel 3.21 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milliar/rupiah)

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	Tahun 2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	150,2	102.561.079.000	589.458.167.645	574,7	102.561.079.000	574,7

Tabel 3.22 Perbandingan Persentase Kinerja
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milliar/rupiah)

Indikator Kinerja utama	Tahun	
	2022	2023
Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN	384.450.426.529	589.458.167.645

Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milliar/rupiah) pada tahun 2023 dari target 102.561.079.000, realisasi 589.458.167.645 dengan capaian 574,7 persen dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 sebesar 384.450.426.529 maka dikatagorikan berhasil. Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (milliar/rupiah) melebihi target pada RPD ditahun 2023 sebesar 102.561.079.000 dengan capaian 574,7 persen.

Capaian kinerja Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (milliar/rupiah) ditunjang oleh program :

1. Program Promosi Penanaman Modal
2. Program Pelayanan Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

11. Tingkat Kemiskinan

untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

**Tabel 3.23 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Tingkat Kemiskinan**

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Tingkat kemiskinan	151	16,17	16,08	99,44	16,17	99,44

**Tabel 3.24 Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Buru
Tingkat Kemiskinan**

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Namlea	-	-	4,213	4,313
Waeapo	-	-	2,206	2,306
Waplau	-	-	2,765	2,765
Batabual	-	-	2,053	2,057
Teluk Kaiely	-	-	1,011	1,015
Waelata	-	-	2,618	2,618
Lolongguba	-	-	2,487	2,487
Lilialy	-	-	2,096	2,196
Air Buaya	-	-	2,559	2,559
Fena Leisela	-	-	2,628	2,679
Buru	15.815	24.670	24.995	24,995

Sumber : Dinas Sosial, 2024

Tingkat kemiskinan target pada tahun 2024 sebesar 16,17, realisasi 16,08 dengan capaian 99,44 persen, dibandingkan dengan capaian di tahun 2023 sebesar 151 persen, maka indikator tingkat kemiskinan dikategorikan belum berhasil. Tingkat kemiskinan pada target RPD di tahun 2023 sebesar 16,17 dengan capaian kinerja sebesar 99,44 persen.

Capaian kinerja Tingkat Kemiskinan ditunjang oleh program :

1. Program Rehabilitasi Sosial

12. Tingkat Pengangguran

3.2 KETENAGAKERJAAN EMPLOYMENT

Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu Terakhir dan Jenis Kelamin di Kabupaten Buru, 2024
Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The Last Week and Sex in Buru Regency, 2024

Kegiatan Utama Main Activity	Jenis Kelamin Sex		
	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Laki-Laki+ Perempuan Male+Female
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan kerja/Economically active	46.021	29.823	75.844
1. Bekerja/Working	43.847	28.466	72.313
2. Pengangguran terbuka/Unemployment	2.174	1.357	3.531
II. Bukan angkatan kerja/Not economically active	7.461	21.295	28.756
1. Sekolah/Attending school	4.056	3.793	7.849
2. Mengurus rumah tangga/Housekeeping	1.870	16.393	18.263
3. Lainnya/Others	1.535	1.109	2.644
Jumlah Total	53.482	51.118	104.600

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

Tingkat pengangguran dengan target ditahun 2024 sebesar 2,5, realisasi 4,66 dengan capaian kinerja 186,4, dibandingkan dengan capaian kinerja ditahun 2023 sebesar 120% maka indikator tingkat pengangguran dikategorikan berhasil. Indikator tingkat pengangguran dikatakan berhasil memenuhi target RKPd sebesar 2,5 dengan capaian kinerja 186,4%.

13. Persentase PMKS Yang Tertangani

Dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, yang dimaksud kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu dapam mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Tabel 3.27 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Persentase PMKS Yang Tertangani

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Persentase PMKS yang tertangani	98,01	79,69	35,64	44,72	100	100

Tabel 3.28 Nama Katagori dan Jumlah PMKS di Kab. Buru
(Tahun 2021-2024)

Jenis penyandang masalah kesenjangan sosial	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Fakir miskin	15.815	24.670	24.995	24.995
Komunitas adat terpencil (KAT)	1.692	1.184	1.184	1.186
Lanjut usia (lansia)	4.747	4.882	882	4.925
Eks penyakit kronis/kusta	96	96	96	178
Kelaurgamuda mandiri (KMM)	421	421	421	421
Eks napi	58	53	53	53
Penyandang disabilitas	293	502	502	502
Wanita rawan sosial (WRSE)	1.305	1.305	1.305	1.334
Pejuang/perintis kemerdekaan	94	94	94	94
Anak terlantar (AT)	1.204	789	789	783
Korban bencana alam	898	346	346	836
Pekerja seks komersil (PSK)	27	48	48	48
Eks pengungsi bencana sosial	-	-	-	5
Waria	20	20	20	10
Rumah tidak layak huni	1.889	2.014	2.014	2.014
Anak nakal	-	-	-	-
Korban tindak kekerasan	118	118	118	118

Pemulung	-	-	-	5
ODHA	-	-	-	-
Pekerja migran bermasalah	-	-	-	1
Gelandangan dan pengemis	-	-	-	2
Anak yang berhadapan dengan hukum	24	24	24	5
Jumlah	28.701	36.566	32.891	37.515

Sumber : Dinas Sosial Kab. Buru 2023

Tabel 3.29 Perbandingan Persentase PMKS Yang Tertangani

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah penyandang cacat dan lanjut usia yang mendapat bantuan alat bantu	-	-	9 orang	10 orang
Lokasi penyuluhan sosial	-	-	2 Lokasi	10 lokasi
Anak jalanan, anak cacat, anak nakal, anak terlantar yang dilatih	-	-	-	-
Dokumen pemberdayaan KAT	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Dokumen pelaporan pembangunan KESOS	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Pendamping dan klin lansia/paca yang didampingi serta dievaluasi	7 Pendamping	4 Pendamping	4 Pendamping	4 Pendamping
Penyandang cacat yang dilatih dan mendapat pelayanan sosial	-	7 Orang	25 Orang	25 Pendamping
Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bantuan rehabilitasi	-	315 Orang	150 orang	943 Orang

Dinas Sosial, Kab. Buru 2024

Persentase PMKS yang tertangani pada tahun 2024 dengan target 79,69, realisasi 35,64 dengan capaian kinerjanya mencapai 44,72 persen, dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian 98,01 persen dan dikategorikan belum berhasil. Persentase PMKS yang tertangani dikatakan belum berhasil dan memenuhi target di RPD sebesar 100 dengan capaian 35,64 persen.

Capaian kinerja persentase PMKS ditunjang oleh program :

1. Program Rehabilitasi Sosial

14. Indeks Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Buru merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 3.30 Target dan Realisasi Capaian Sasaran Indeks Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Indeks pelayanan publik	101	61,18	59,86	97,84	61,18	97,84

Tabel. 3.31 Perbandingan Indeks Pelayanan Publik 2021-2024

Indikator Kinerja utama	Indeks Pelayanan Publik			
	2021	2022	2023	2024
Indeks pelayanan publik yang dinilai Kementerian PAN RB	3,22	3,46	1,79	
Indeks pelayanan publik yang dinilai Ombudsman	50,09 (Merah)	54,71 (Kuning)	54,99 (Kuning)	59,86 (Kuning)

Bagian Organisasi Setda Buru

Indeks pelayanan publik dengan target di tahun 2024 sebesar 61,18, realisasi 59,86 dengan capaian 97,84 persen. Dibandingkan dengan tahun 2023 dengan capaian kinerja sebesar 101 persen maka indikator indeks pelayanan publik dikategorikan belum berhasil dan mengalami penurunan. Capaian kinerja indeks pelayanan publik belum melebihi target di tahun 2024 pada RPD 61,18 dengan capaian 59,86 persen.

Pada tahun 2024 Kabupaten Buru melalui Ombudsman RI Perwakilan Maluku melakukan penilaian penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Buru. Supervisi yang berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut dilakukan mencakup OPD

yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Namlea.

Dari hasil survey Pelayanan Publik maka Pemerintah Kabupaten Buru mendapat nilai 54,99 Zona Kuning atau katagori sedang. Penilaian itu didapatkan dari predikat kepatuhan standar pelayanan publik dan diharapkan dapat mendorong Pemerintah Daerah melalui OPD terkait untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik baik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara layanan dan pengelolaan pengaduan. Perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan terhadap maladministrasi melalui pemenuhan standar pelayanan, pemenuhan sarana prasarana, peningkatan kompetensi penyelenggaraan layanan serta kualitas pengelola pengaduan pada tiap unit.

Sedangkan Indeks Pelayanan Publik yang dinilai dari Kementerian PAN RB melalui Biro Organisasi Setda Provinsi dengan sample Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buru pada tahun 2023 memperoleh nilai 1,79 B-

Capaian kinerja Indeks pelayanan publik ditunjang oleh program :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

15. Opini BPK

Tabel 3.32 Target dan Realisasi Capaian
Opini BPK

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100	WTP	100

Tabel. 3.33 Perbandingan Opini BPK
2021-2024

Indikator Kinerja utama	2021	2022	2023	2024
-------------------------	------	------	------	------

Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
-----------	-----	-----	-----	-----

Inspektorat, 2024

Raihan Opini BPK-RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah pada tahun 2024 menargetkan persentase 75% atau raihan opini yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam artian Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Realisasi Capaian pada tahun 2024 atas opini BPK berada pada 68,17 %, yang artinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Belum tercapainya target disebabkan karena tindak lanjut oleh obrik atas temuan baik pending dan murni pada tahun-tahun sebelumnya belum sesuai yang diharapkan dan ditambah adanya temuan yang muncul di tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Buru meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku.

Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. BPK dapat memberikan empat jenis opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT), dan Tidak Wajar (TW). Kegiatan yang ada dalam Indikator kinerja Raihan Opini dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya :

1. Jumlah Instansi yang dilakukan penutupan kas (terdatanya saldo kas dan persediaan akhir tahun) (Program Penyelenggaraan Pengawasan).
2. Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)) (Program Penyelenggaraan Pengawasan).

16. Nilai Hasil AKIP

Tabel 3.36 Target dan Realisasi Capaian
Nilai Hasil Evaluasi AKIP

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Nilai hasil evaluasi AKIP	B	B	B	100	B	100

Tabel. 3.37 Perbandingan Nilai Hasil Evaluasi SAKIP
2021-2024

Indikator Kinerja utama	2021	2022	2023	2024
Nilai hasil evaluasi SAKIP	CC	B	B	B

Bagian Organisasi setda, 2024

Nilai evaluasi AKIP dari target tingkat akuntabilitas kinerja B realisasi B dengan nilai 61,16, dibandingkan dengan tahun 2023, tingkat akuntabilitas kinerja B dengan nilai 60,84.

Pemerintah Kabupaten Buru melalui Bagian Organisasi melakukan upaya peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja OPD dan melakukan perbaikan atas Laporan Kinerja Kabupaten Buru guna mendapatkan hasil sesuai dengan target pada RPD.

Capaian kinerja cakupan nilai evaluasi AKIP ditunjang oleh program :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

17. Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

Tabel 3.38 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Persentase Ketaatan Terhadap RTRW

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Persentase ketaatan terhadap RTRW	129	77	76	98,7	77	98,7

Persentase ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2024 dengan target 77, realisasi 76 dengan capaian 98,7 persen, dibandingkan dengan capaian ditahun 2023 sebesar 129 persen, maka dikatagorikan belum berhasil. Persentase ketaatan terhadap RTRW dengan target pada RPD 77 dengan capaian RPD 98,7 persen.

Capaian kinerja persentase ketaatan terhadap RTRW ditunjang oleh program :

1. Program pengembangan permukiman

18. Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik

Tabel 3.39 Target dan Realisasi Capaian Sasaran
Proporsi Jalan Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja utama	Capaian 2023	2024			Target RKPD (2024)	Capaian realisasi RKPD 2024 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	Proporsi jalan dalam kondisi baik	149,5	27,93	41,76	178,7	89,66	46,6

Tabel 3.40 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten

Buru

Kondisi Jalan Condition of Roads	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Baik/ <i>Good</i>	180.88	207.74	271.20	286,19
Sedang/ <i>Moderate</i>	276.70	324.83	332.95	301,36
Rusak/ <i>Damage</i>	452.71	439.25	428.88	306,36
Rusak Berat/ <i>Severely Damage</i>	599.71	538.18	476.97	616,09
Jumlah/Total	1510.00	1510.00	1 510.00	1510,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

Tabel 3.41 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Buru (km), 2024

Kecamatan Subdistrict	Kondisi Jalan Road Condition				Jumlah Total
	Baik Good	Sedang Moderate	Rusak Damage	Rusak Berat Severely Damage	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Namlea	96.39	88.81	10.47	56.83	252.50
Waeapo	13.57	64.29	36.56	21.59	136.00
Waplau	24.98	55.37	61.85	54.80	197.00
Bata Bual	12.05	7.05	0.90	40.00	60.00
Teluk Kaiely	8.55	11.15	5.30	37.00	62.00
Waelata	22.86	6.59	108.77	43.78	182.00
Lolong Guba	31.88	9.51	79.61	107.00	228.00
Lilialy	27.27	48.02	13.18	14.54	103.00
Air Buaya	22.36	10.95	9.54	48.65	91.50
Fena Leisela	11.30	31.20	102.70	52.80	198.00
Jumlah/Total	271.20	332.95	428.78	476.97	1510.00
2021	207.73	324.27	439.25	538.13	1510.00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
BPS (data sementara)

Panjang jalan di Kabupaten Buru tahun 2024 mencapai 1.805,06 km. Sekitar 84 persen dari panjang jalan tersebut merupakan kewenangan

pemerintah Kabupaten Buru. Sebesar 483,68 km permukaan jalan masih berupa tanah, 569,87 km berupa kerikil, sedangkan 425,34 km telah memiliki permukaan jalan berupa aspal. Sementara itu, sebagian besar jalan masih berstatus rusak dan rusak berat, yakni sepanjang 905,85 km atau sekitar 60 persen.

Proporsi jalan dalam kondisi baik mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti bandara dan pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Kondisi panjang jalan nasional dalam kondisi 100 persen baik hingga di tahun 2024, sedangkan jalan provinsi dan kabupaten ada perbaikan sehingga walaupun panjang jalan tetap sama dalam tiga tahun tetapi persentase perbaikan panjang jalan mengalami kenaikan maupun penurunan dalam tiga tahun.

Capaian kinerja proporsi jalan dalam kondisi baik ditunjang oleh program :

1. Program penyelenggaraan jalan

3.3 Akuntabilitas Anggaran

APBD Kabupaten Buru pada tahun 2024 untuk anggaran pendapat sebesar Rp. 887,650,194,016,00 dan belanja sebesar Rp. 903.791.483.910,42 Sedangkan realisasi APBD Kabupaten Buru Tahun 2024 untuk pendapatan sebesar Rp. 829.485.738.372,80 dan realisasi belanja sebesar Rp. 830.789.551.693,86

Tabel 3.42 Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi 2024	(%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Daerah	887.650.194.016,00	829.485.738.372,80	93,45
	Pendapatan Asli Daerah	48.800.000.000,00	29.862.491.918,40	61,19



	Pendapatan Transfer	821.056.352.576,00	780.181.214.891,00	95,02
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	17.793.841.440,00	19.442.031.563,40	109,26
2	Belanja Daerah	903.791.483.910,42	830.789.551.693,86	91,92
	Belanja Operasi	590.512.995.747,00	571.912.838.369,44	96,85
	Belanja Modal	161.504.882.341,00	109.222.957.507,42	67,63
	Belanja Tidak Terduga	1.295.927.372,42	1.025.860.429,00	79,16
	Belanja Transfer	150.477.678.450,00	148.627.895.388,00	98,77
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.141.289.894,42)	(1.303.813.321,06)	8,08
3	Pembiayaan Daerah			
	Penerimaan Pembiayaan	18.141.289.894,42	18.141.289.894,42	100,00
	Pengeluaran Pembiayaan	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)	(0,00)	15.837.476.573,36	-

Sumber BPKAD, 2024

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 830.789.551.693,86 yang digunakan untuk membiayai Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2024 (sebelum dilakukan audit BPK RI) sebagai berikut :

Tabel 3.43 Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Rencana (Rp)
1	Belanja Operasi	590.512.995.747,00
2	Belanja Modal	161.504.882.341,00
3	Belanja Tidak Terduga	1.295.927.372,42
Jumlah		753.313.805.460,00

Sumber BPKAD, 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru tahun 2024 merupakan media akuntabilitas yang dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Buru. Setiap Perangkat Daerah (PD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buru telah mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Buru Tahun 2024, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah telah memperhatikan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 13 (tiga belas) sasaran strategis, 18 (delapan belas) indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 18 indikator kinerja utama Bupati tahun 2024, disimpulkan bahwa 5 (lima) indikator sasaran dalam kriteria sangat tinggi, 3 (tiga) IKU capaiannya 100 persen, sedangkan 10 (sepuluh) IKU dibawah 100 persen. Dengan demikian masih terdapat beberapa indikator kinerja utama yang capaiannya belum seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun berikutnya.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicatumkan dalam RKPD Kabupaten Buru Tahun 2024 khususnya untuk anggaran 2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, menjadi bahan refleksi sebagai motivasi untuk berusaha lebih keras dan lebih baik lagi.

